

**CARUT MARUT KURIKULUM DI INDONESIA BERSUMBER DARI
DISTORSI LANDASAN PENDIDIKAN**

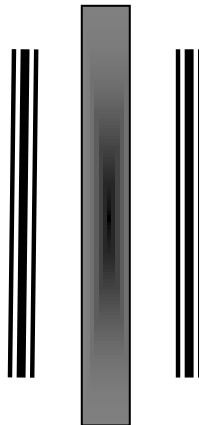


Oleh :

I Made Bagus Andi Purnomo

NIM : 15.1.2.5.2.0862

Semester 1/B



**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA HINDU INSTITUT
HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR**

2015

Landasan pendidikan adalah bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankann yang sesuai dengan karekter bangsa Indonesia yang heterogen terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama. (Sukarja:2011)

Namun, yang terjadi di Indonesia adalah landasan pendidikan yang sebenarnya bersumber dari Panca Sila dan diturunkan menjadi Undang Undang Dasar dan segala macam turunannya malah diaplikasikan tidak sesuai dengan yang semestinya dan cenderung mengikuti arus konsep pendidikan modern dari dunia barat seperti konsep pragmatisme, sekularisme dan lain lainnya. Inilah yang kemudian disebut dengan distorsi atau pengkaburan landasan pendidikan yang ada.

Burhanuddin (2004) menjelaskan realisasi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang pendidikan adalah Indonesia menyelenggarakan sistem pendidikan yang khas. Walaupun dalam model umumnya memiliki kesamaan dengan Negara lainnya.

Perbedaan yang menonjol adalah pada tujuan pendidikannya. Indonesia memiliki cita-ciita tersendiri dalam pencapaian pendidikan sehingga sistem pendidikan diarahkan pada terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam perubahan social politik sekarang ini kecenderungan desentralisasi, tuntutan reformasi mendorong pendidikan untuk menformulasi tujuannya dalam format yang lebih bernuansa bottom up dengan menekankan pemberdayaan kedaerahan.

Dalam format desentralistik, pendidikan nasional Indonesia saat ini memiliki sistem dan model penyelenggaraan yang berlainan dengan sebelumnya. Perubahan yang terjadi sebenarnya bukan semata-mata diakibatkan oleh reformasi external pendidikan, namun beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam multidimensi telah menempatkan bidang pendidikan sebagai upaya yang bernilai amat strategis bagi pengentasan kesulitan bangsa.

Namun pendidikan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh corak sentralistik sehingga sangat dibutuhkan model yang sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan. (Susilo: 2011)

Berbicara tentang landasan pendidikan sebenarnya menyangkut beberapa aspek yakni:

1. Landasan Filosofis

Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting adalah pencapaian efektif.

Dua pandangan yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia adalah :

1). Pandangan tentang manusia Indonesia

Filosofis pendidikan nasional memandang manusia Indonesia sebagai :

- Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya
- Makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya
- Makhluk social dengan segala tanggungjawab hidup dalam masyarakat yang pluralistic baik dari segi lingkungan social budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan NKRI di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.

2). Pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri.

Pendidikan nasional dipandang sebagai pranata social yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan social lain dalam masyarakat.

Landasan filosofis Pancasila mengisyaratkan bahwa sistem pendidikan nasional hendaknya bertumpu pada pemenuhan hak-hak asasi manusia. Harus dijaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terkait dengan pemenuhan harkat manusia.

Landasan filosofis pendidikan nasional memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sebaiknya mengimplementasikan ke arah :

- Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi social, budaya, ekonomi dan memelihara keutuhan bangsa dan Negara.
- Sistem Pendidikan Indonesia yang pada proses pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai individu lain, suku, ras, agama status social ekonomi, dan golongan sebagai manifestasi rasa cinta tanah air.
- Sistem Pendidikan Indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi.
- Sistem Pendidikan Indonesia yang bertumpu pada norma keadilan social untuk seluruh warga Negara Indonesia.
- Sistem Pendidikan Indonesia yang mampu menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demojratis, cinta tanah air, dan memiliki tanggung jawab social yang berkeadilan.

2. Landasan Sosilogis

Pendidikan nasional Indonesai yang berlandaskan sosiologis dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek yang berhubungan dengan social baik poblemanya maupun demografisnya. Masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah disparitas sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban disparitas tersebut.

3. Landasan Yuridis

Hakekat pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31. Penting undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air.

Dari ketiga landasan itu, Bagaimana sebenarnya pelaksanaan landasan pendidikan di tanah air?

Berbagai permasalahan muncul ketika sebuah kurikulum baru diaplikasikan dalam dunia kependidikan kita. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Sebuah konsep pendidikan yang sangat bagus namun tidak banyak didukung oleh faktor-faktor yang mampu menopang dan memuluskan pelaksanaan kurikulum tersebut. Pelaksanaan kurikulum yang terlalu cepat, suplai buku yang terlambat dan kurang merata, metode pengajaran yang baru dan dianggap membingungkan bagi sebagian guru dan siswa, dan beberapa permasalahan lainnya. Berbagai kendala ini akhirnya menuai polemik di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dunia kependidikan. Hingga akhirnya mencuat sebuah wacana baru saat adanya pergantian pemerintah dan kabinet, yaitu kemungkinan dihentikannya pelaksanaan Kurikulum 2013.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan. Namun, dikarenakan ada 6.221 sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama tiga semester lebih maka sekolah-sekolah inilah yang kemudian dijadikan sebagai sekolah percontohan serta sarana untuk mengembangkan dan menyempurnakan Kurikulum 2013.

Mendikbud lebih lanjut memaparkan, proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama

tiga semester terakhir. Keputusan tersebut diambil oleh Kemendikbud dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013.

Beberapa masalah yang menjadi kendala, antara lain kesiapan buku penunjang, sistem penilaian yang masih belum dipahami oleh semua guru, serta masih kurangnya penataran guru, pendampingan guru, dan pelatihan kepala sekolah.

Setelah Kemendikbud mengeluarkan pernyataan tersebut, implementasi Kurikulum 2013 rencananya tetap dilakukan secara terbatas untuk sekolah-sekolah yang pada Tahun Pelajaran 2013/2014 telah melaksanakan kurikulum tersebut. Hanya sekolah-sekolah tersebut yang wajib menjalankan Kurikulum 2013 sebagai tempat untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum tersebut.

Namun, tidak dipungkiri perubahan kurikulum yang begitu cepat sangat terpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan itu sendiri apalagi jika kurikulum tidak sesuai dengan karakter dan keadaan bangsa Indonesia.

Dari beberapa fenomena itu ditarik beberapa kesimpulan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan di bidang pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menduduki peringkat di bawah negara-negara di Asia. Hal ini sangat berkaitan dengan masalah-masalah kurikulum yang dihadapi Indonesia. Masalah kurikulum di Indonesia dapat diselesaikan tidak cukup dengan mengganti namanya saja, melainkan harus melakukan perombakan secara menyeluruh dari kurikulum.

Masalah kurikulum juga terletak dari sarana dan prasarana yang kurang merata. Selain itu, kurikulum Indonesia yang terlalu kompleks, kurangnya sumber prinsip pengembangan dan membebani siswa beserta guru yang berkaitan menjadikan kurang maksimalnya pembelajaran.

BACAAN

- Sudarsana, I. K. (2014). PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN UPAKARA BERBASIS NILAI PENDIDIKAN AGAMA HINDU UNTUK MENINGKATKAN PERILAKU KEWIRAUSAHAAN: Studi pada Remaja Putus Sekolah di Kelurahan Peguyangan Kota Denpasar.
- Sudarsana, I. K. (2015). PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA. *Jurnal Penjaminan Mutu*, (Volume 1 Nomor 1 Pebruari 2015), 1-14.
- Sudarsana, I. K. (2016). DEVELOPMENT MODEL OF PASRAMAN KILAT LEARNING TO IMPROVE THE SPIRITUAL VALUES OF HINDU YOUTH. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(2), 217-230.
- Sudarsana, I. K. (2016). PEMIKIRAN TOKOH PENDIDIKAN DALAM BUKU LIFELONG LEARNING: POLICIES, PRACTICES, AND PROGRAMS (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, (2016), 44-53.